



PERAN SOSIALISASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PEMILU

Oleh
Warno

STISIP Guna Nusantara Cianjur

Email: papaku.1970@gmail.com

Abstrak

Kandidat yang mengikuti pemilu diseleksi terlebih dahulu karena harus memenuhi persyaratan dan sistem sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem pemilu saat ini, banyak pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan dan oleh karena itu diperlukan informasi dan prosedur pemilu yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemilu. Desain penelitian ini adalah tinjauan pustaka atau survei literatur. Tinjauan pustaka adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya dari referensi yang menjadi dasar suatu penelitian. Kerangka teori, tinjauan teori, dan tinjauan literatur adalah beberapa cara untuk melakukan tinjauan literatur. Tinjauan literatur dirangkum menggunakan metode deskriptif dengan mengelompokkan kutipan data yang serupa menurut hasil yang terukur berdasarkan tujuan jurnal. Partisipasi politik adalah aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas modernisasi politik. Karena keputusan politik yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan warga negara. Hal ini karena tingkat partisipasi yang tinggi berarti warga negara sadar akan isu-isu politik dan ingin berpartisipasi di dalamnya.

Kata Kunci: Politik, Sosialisasi, Partisipasi Politik, Pemilu

PENDAHULUAN

Upaya demokratisasi di Indonesia bergerak menuju kemajuan, yang ditunjukkan dengan fakta bahwa rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi di dalam pemerintahan. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” (rakyat) dan “kratēne” (pemerintahan), dan gabungan kedua kata ini memberikan arti kata demokrasi yaitu pemerintahan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Dalam buku Muchtar Pakpahan (2010:134), Abraham Lincoln mengemukakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilu merupakan sarana kelangsungan politik dalam negara demokrasi dimana warga negara dapat secara langsung memilih wakil-wakilnya untuk duduk di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Di dalam demokrasi, suara rakyat merupakan aset yang sangat berharga karena rakyatlah yang menentukan

pemerintahan, dan keberhasilan suatu negara dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) menjadi tolok ukur keberhasilan negara tersebut dalam menegakkan demokrasi. Abraham Lincoln pernah mengemukakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Dzuyandi, 2014).

Menurut Sayuti (2018), pemilu merupakan pesta demokrasi yang semestinya dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih ada kekuatiran bahwa pemilu tahun ini tidak akan membawa banyak perubahan untuk masyarakat. Sikap pesimis yang mempertanyakan apakah hasil pemilu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat ini disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Sejumlah persoalan politik, seperti kasus korupsi di kalangan politisi, anggota parlemen dan pemerintah



(administrasi), serta kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, telah menciptakan stigma bahwa pemilu pada era reformasi belum membawa perubahan positif dan inspiratif untuk rakyat.

Penyebab rendahnya partisipasi politik biasanya karena sikap apatis dan apriori terhadap kegiatan politik, di mana orang lebih memilih kegiatan sehari-hari seperti bekerja, olahraga, klub sosial, bepergian, dan sebagainya, yang dianggap lebih nyata daripada partisipasi politik. Faktor lain yang berkaitan erat dengan partisipasi politik adalah tingkat pendidikan masyarakat: semakin berpendidikan, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam politik, yang secara paradoks menyebabkan rendahnya tingkat keterlibatan politik di banyak negara berkembang yang tingkat literasi masyarakatnya masih rendah (Putri, 2016).

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, lebih mudah untuk mengukur partisipasi politik masyarakat ketika pemilihan umum diadakan. Intensitas keterlibatan warga negara dapat diukur dengan membandingkan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (voter turnout) dengan jumlah total warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Di negara-negara dengan sistem demokrasi yang stabil, tingkat partisipasi politik umumnya sangat stabil dan tidak mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, peningkatan angka golput merupakan pertanda buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, karena ketika angka golput meningkat maka demokrasi tidak berjalan dengan baik (Djuyandi, 2014).

Tingginya angka golput menjadi masalah serius bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu, namun partai politik juga harus memperhatikan agar KPU dapat membantu meminimalisir angka golput. Tantangan bagi KPU saat ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran politik. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi yang intensif terhadap masyarakat tentang betapa

pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KPU memiliki misi untuk mendidik para pemilih, dan KPU harus menjaga kredibilitasnya dengan selalu mengedepankan independensi, integritas pribadi, dan profesionalisme. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul ambivalensi. Jika lembaga penyelenggara pemilu mendidik dan memberi informasi kepada semua pemilih, mereka dapat memberikan suara secara kritis dan rasional serta memantau semua pemilu di daerah mereka. Namun, untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan aman dan adil, dan hasilnya dapat diterima oleh para pemimpin masa depan, Komisi Pemilihan Umum harus menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, integritas pribadi, dan profesionalisme. Sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemungutan suara), KPU memiliki kepentingan strategis dan harus profesional, akuntabel, dan berintegritas. Peran KPU adalah untuk memastikan bahwa mekanisme hukum tersedia untuk memungkinkan para pemilih menggunakan hak pilih mereka. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu pernyataan misi KPU, "meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam pemilu untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis", pemilu memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Karena salah satu tujuan strategis KPU adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam proses pemilu, jelas bahwa untuk mencapai proses demokratisasi di Indonesia, KPU harus secara sistematis menerapkan model komunikasi publik yang tepat untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Terlepas dari sejumlah tantangan dalam Pemilu 2019, harus diakui bahwa KPU telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih secara signifikan dalam Pemilu 2019. Partisipasi pemilih sangat



.....
penting bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah, karena partisipasi pemilih yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemilu, yang menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Partisipasi pemilih juga mempengaruhi legitimasi politik pemerintah yang terpilih. Dibandingkan tahun 2014, partisipasi rakyat pada Pemilu 2019 meningkat hampir 10%. Partisipasi rakyat pada Pemilu 2019 mencapai 81 persen, melampaui Pilpres 2014 (70 persen) dan Pemilu 2014 (75 persen). Angka ini jauh di atas target KPU nasional sebesar 77,5 persen (Pulungan, 2020).

Akan tetapi, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemilu di Indonesia saat ini, yaitu informasi publik mengenai proses-proses penting dalam pilkada. Ada kebutuhan untuk memberikan lebih banyak informasi kepada publik tentang proses-proses penting dalam pemilu, termasuk informasi pra-kandidat, proses pencalonan kandidat, penghitungan suara hingga kandidat terpilih, kampanye, cara mendaftar untuk memilih, prosedur pemungutan suara yang benar, serta di mana dan kapan harus memilih. Ada banyak masalah dengan politik uang, penggelembungan suara, pemilih ganda, dan pemalsuan daftar pemilih, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu - ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu, dan seharusnya tidak terjadi. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan suara dalam pemilu sangat memprihatinkan. Masyarakat saat ini telah menjadi tidak peduli terhadap pemerintah.

Pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat Indonesia. Perubahan sistem pemilu pasca reformasi dari sistem perwakilan proporsional tertutup menjadi sistem perwakilan proporsional terbuka tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan setara, yaitu transparansi pemilu.

Evaluasi sistem pemilu dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang: Keadaan sistem ekonomi, keadaan sistem politik, prosedur pemilu, pelaksanaan pemilu lokal, prosedur pemilu, perilaku pemilu penduduk, partisipasi perempuan dalam partai politik, pandangan penduduk terhadap demokrasi dan munculnya isu-isu baru dalam pemilu. Kandidat yang mengikuti pemilu diseleksi terlebih dahulu karena harus memenuhi persyaratan dan sistem sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem pemilu saat ini, banyak pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan dan oleh karena itu diperlukan informasi dan prosedur pemilu yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti "peran sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu"

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah tinjauan pustaka atau survei literatur. Tinjauan pustaka adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya dari referensi yang menjadi dasar suatu penelitian. Tinjauan pustaka adalah proses di mana penulis meninjau, meringkas, dan memahami berbagai sumber literatur (artikel, buku, slide, informasi dari Internet, dll.) tentang topik yang sedang dibahas. Tinjauan literatur yang baik haruslah relevan, mutakhir, dan terkini. Kerangka teori, tinjauan teori, dan tinjauan literatur adalah beberapa cara untuk melakukan tinjauan literatur. Tinjauan literatur dirangkum menggunakan metode deskriptif dengan mengelompokkan kutipan data yang serupa menurut hasil yang terukur berdasarkan tujuan jurnal. Hasil yang memenuhi kriteria inklusi dirangkum dalam bentuk abstrak jurnal yang mencakup nama peneliti, tahun publikasi, negara tempat penelitian, judul penelitian, metode penelitian, dan ringkasan temuan atau kesimpulan. Abstrak dari jurnal ilmiah diurutkan berdasarkan abjad dan tahun publikasi dan disajikan dalam bentuk tabel dengan format



seperti di atas. Abstrak dan teks lengkap dari jurnal-jurnal tersebut dibaca dan ditinjau untuk memperjelas analisis. Selanjutnya, abstrak dari jurnal dianalisis untuk menentukan tujuan penelitian dan isi temuan.

Jurnal-jurnal tersebut menjadi sasaran analisis isi dan isi jurnal yang diteliti diberi kode menggunakan kategori psikospiritual. Kesamaan dan perbedaan dalam data yang dikumpulkan kemudian diperiksa dan didiskusikan untuk menarik kesimpulan (Nasution, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik mengacu pada hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi politik berkaitan erat dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kaitan yang erat. Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik mempengaruhi legitimasi kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. Sebagai contoh, dalam pemilihan umum, partisipasi politik mempengaruhi legitimasi dua kandidat yang menang. Ketika membuat keputusan dalam pemilu, setiap warga negara memiliki preferensi dan kepentingannya masing-masing. Partisipasi politik dalam pemilu juga dapat dilihat sebagai sarana bagi warga negara untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan tersebut bergantung pada tingkat partisipasi politik. Partisipasi politik tidak hanya merupakan esensi dari demokrasi, tetapi juga terkait erat dengan pelaksanaan hak-hak politik warga negara (Arniti, 2020).

Salah satu indikator partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia adalah perilaku politik mereka. Perilaku politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kegiatan publik dan partisipasi di tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilu. Bentuk-bentuk perilaku politik ini merupakan alat analisa yang memungkinkan kita untuk melacak partisipasi politik masyarakat. Sebuah penelitian sebelumnya

oleh Bismar Ariant (2011), "Analisis Alasan Mengapa Orang Tidak Memilih dalam Pemilu", menyimpulkan bahwa alasan utama mengapa orang tidak memilih atau menggunakan hak pilihnya dapat diklasifikasikan dalam dua kategori: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor teknis, yaitu kendala teknis yang dihadapi oleh pemilih (misalnya sakit, ada pekerjaan lain, masalah pribadi lainnya, dan lain-lain). Faktor lain yang termasuk faktor teknis adalah faktor pekerjaan. Faktor eksternal meliputi faktor administratif, faktor sosialisasi dan faktor politik. Faktor administratif mengacu pada aspek administratif yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, misalnya tidak adanya registrasi, kartu pemilih atau kartu identitas. Faktor sosialisasi adalah penyebaran informasi tentang pemilihan umum kepada masyarakat setiap kali pemilihan umum berlangsung. Faktor politik adalah penyebab atau alasan yang muncul dari aspek politik, antara lain ketidakpercayaan terhadap partai politik, kurangnya kesempatan untuk memilih kandidat, atau ketidakpercayaan bahwa pemilihan umum atau pemilihan anggota dewan daerah akan membawa perubahan dan perbaikan.

Menurut Afa (2021), partisipasi politik masyarakat merupakan ekspresi dari negara demokrasi dimana masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum, dimana warga negara memilih pejabat publik yang menentukan jalannya pemerintahan dan berperan penting dalam tindakan selanjutnya. Partisipasi politik adalah upaya masyarakat untuk berperan dalam kehidupan politik dengan cara menggunakan hak pilihnya, bergabung dengan organisasi, mendiskusikan isu-isu politik dengan orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan dan gerakan, bergabung dengan partai politik atau organisasi independen, berpartisipasi dalam kampanye peningkatan kesadaran, mendidik diri sendiri, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.



Sosialisasi politik dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sosialisasi berkaitan erat dengan komunikasi politik, karena komunikasi politik merupakan proses interaksi langsung antara kelas elit dan masyarakat. Strategi komunikasi politik mencakup pencapaian tujuan politik di masa depan, memperkuat lembaga-lembaga politik, dan memutuskan bersama langkah apa yang harus diambil sekarang untuk mencapai persatuan dan konsensus. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diperlukan strategi, taktik dan perencanaan yang canggih. Badan-badan pemilihan umum harus mengembangkan atau mengadopsi strategi-strategi yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Strategi ini dapat berupa sosialisasi publik, misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan keterampilan teoritis dan praktis untuk berpartisipasi dalam pemilu. Strategi ini memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya memilih dan berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih mereka (Heriyanto, 2018).

Menurut Andriyadi (2017), definisi sosialisasi politik adalah suatu proses pembelajaran pengalaman yang secara umum mengacu pada hasil belajar perilaku individu dan kelompok, baik secara umum maupun secara khusus dalam hal pengetahuan atau informasi, nilai dan sikap. Sosialisasi tidak terbatas pada usia; sosialisasi politik dapat terjadi di berbagai tempat, misalnya di keluarga, di sekolah, di negara, atau di partai politik.

Tujuan dari sosialisasi politik adalah untuk memungkinkan Anda memperluas pemahaman, kesadaran, dan apresiasi Anda terhadap isu-isu politik yang baru. Melalui proses sosialisasi ini, Anda akan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan membantu Anda memainkan peran politik. Anda juga akan dapat memahami norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sebagai bagian dari proses sosialisasi, Anda juga akan dapat menangani

isu-isu yang mempengaruhi kepentingan pribadi Anda dan kepentingan orang lain, sehingga Anda memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang gejala politik dan isu-isu politik yang muncul di masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat sehingga mereka dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan politik negara secara keseluruhan (Djuyandi, 2014).

Pendidikan politik di Indonesia, terutama untuk calon politisi, telah diperkenalkan di sekolah-sekolah. Salah satu contohnya adalah dengan dimasukkannya pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah. Selain itu, pendidikan politik juga ditanamkan dalam budaya sekolah melalui pemilihan umum yang demokratis seperti pemilihan OSIS, ketua kelas, dan pengurus kelas. Sikap demokratis siswa dapat dibentuk dalam lingkungan kesehariannya, baik itu di keluarga, di masyarakat maupun di lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Sikap demokratis yang ditanamkan sejak dini akan mempengaruhi siswa di kemudian hari ketika mereka sudah diberikan hak-hak politik sebagai warga negara. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat belajar bagaimana demokrasi akan berjalan di Indonesia di masa depan (Husni, 2021).

Pemerintah benar-benar berusaha untuk mengajak generasi muda terjun ke dunia politik. Namun, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki akses pendidikan? Upaya apa yang dilakukan KPU Tuban dan pemerintah untuk memutus mata rantai rendahnya partisipasi masyarakat? Dari hasil interview, salah satu usaha KPU Tuban adalah meningkatkan partisipasi politik warga melalui pendidikan politik di masyarakat. Untuk memahami kesadaran politik pemilih pemula, kita perlu mengadakan atau memperbaharui berbagai kursus yang melibatkan mereka secara langsung, karena merekalah yang dapat mendobrak suara anggota legislatif, eksekutif, dan pengambil keputusan di daerah. Mereka



juga dapat mengembangkan pemikiran kritis dengan melihat kondisi kandidat (Husni, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi politik adalah aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas modernisasi politik. Karena keputusan politik yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan warga negara. Warga negara memiliki hak untuk ikut menentukan isi keputusan tersebut. Oleh karena itu, sering diasumsikan bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin baik demokrasi. Hal ini karena tingkat partisipasi yang tinggi berarti warga negara sadar akan isu-isu politik dan ingin berpartisipasi di dalamnya. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah sering dianggap sebagai pertanda buruk karena mengindikasikan bahwa banyak warga negara yang tidak tertarik dengan urusan nasional. Fungsi dan manfaat sosialisasi politik sangat banyak. Tentu saja mustahil bagi seorang individu untuk tidak menginginkan kekuasaan di dalam kelompok, bangsa, atau keluarga tempat ia berasal. Dengan kondisi ini, tugas penelitian sosialisasi politik adalah memberikan informasi langsung tentang bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, sosialisasi politik memiliki keuntungan dalam melestarikan sistem politik regional dan nasional. Pelestarian berarti kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mencapai hal ini, pada akhirnya penting bagi setiap orang untuk menyadari pentingnya sosialisasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AF, S. A. Z., & Gumuruh, A. R. (2021). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (Study Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi di Desa Kalirejo Kecamatan Kabat). *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(2), 1-7.
- [2] Andriadi, Fayakhun. 2017. Partisipasi Politik Virtual: Demokrasi Netizen di Indonesia. Jakarta: RMBooks.
- [3] Alfian, M. A. (2013). Menjadi pemimpin politik. Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- [5] Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2), 1202-1212.
- [6] Heryanto, Gun Gun. 2018. Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di
- [7] Panggung Politik. Yogyakarta: IRCiSoD.
- [8] Husni, M. W., & Harmanto, H. (2021). UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TUBAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(2), 374-388.
- [9] Nasution, M. K. M. (2017). Penelaahan literatur. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, 3, 1-7.
- [10] Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 30.
- [11] Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251-272.
- [12] Sayuti, A., Ulum, B., & Kusnadi, D. (2018). Netralisasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang Undang Nomor



7 Tahun 2017 (Doctoral dissertation, UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN